

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi, permasalahan baik di dunia usaha, perbankan, pemerintahan maupun masyarakat menjadi semakin kompleks sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu. Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang memegang peranan penting khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi.

Setiap entitas pemerintahan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan selama satu periode. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk tercapainya tujuan negara tersebut, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan mandat konstitusi tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan suatu institusi yang dipercaya dapat mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, transparan, dan akuntabel (*good governance*).

Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* menurut Bank Dunia (*World Bank*) didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2005).

BPKP adalah organisasi yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memeriksa transparansi dalam pelaporan dan praktik pengelolaan realisasi anggaran sektor publik, mengawasi realisasi anggaran daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat, dan juga bertujuan mengembangkan aspek-aspek ekonomi yang ada di daerah tersebut.

BPKP merupakan Auditor Pemerintah, diantara yang lain terdapat Auditor Internal Perusahaan dan Auditor Eksternal (KAP). Auditor merupakan pihak yang berperan penting dalam mengontrol dan menjaga kepentingan publik di bidang yang terkait dengan keuangan. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan.

Salah satu manfaat dari jasa auditor adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang belum diaudit. Para pengguna laporan audit mengharapkan laporan audit yang telah diaudit bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.

Auditor Eksternal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Ayat (2) berbunyi, “Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat bersikap independen”.

Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit

pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Landasan dasar pokok dan fungsi BPKP secara resmi diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Pembangunan. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas utama melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya dalam pelaksanaan pengawasan keuangan dan pembangunan serta menyelenggarakan akuntabilitas di daerah, pegawai BPKP khususnya Auditor Internal harus bekerja secara optimal, sesuai dengan visi dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “Auditor Internal Pemerintah RI berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”.

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPKP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya pertimbangan rasa manusiawi, kekeluargaan dan kebersamaan. Selain itu masalah yang dihadapi adalah sikap/perilaku, kemampuan

aparatus pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien.

Auditor internal pemerintah yang bekerja di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diharapkan bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku bagi auditor internal pemerintah terdiri dari Kode Etik dan Standar Auditor Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP. Kode etik yang dimaksudkan agar auditor internal pemerintah dapat menjaga perilaku dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu dari hasil audit yang dilaksanakan.

Kode Etik APIP tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah untuk mendorong sebuah budaya etis dan profesional, agar terpenuhinya prinsip-prinsip akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dalam kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Kode Etik ini memiliki dua komponen yaitu prinsip-prinsip perilaku auditor dan aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip auditor. Prinsip-prinsip perilaku auditor antara lain integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.

Standar Audit APIP diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, digunakan sebagai acuan seluruh APIP dalam

melaksanakan tugas audit. Standar Audit APIP terdiri dari prinsip-prinsip dasar, standar umum, standar audit kerja dan standar audit investigatif. Adanya Standar Audit APIP ini diharapkan dapat memberikan standar yang seragam bagi seluruh APIP.

Keberadaan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP masih saja menimbulkan praktik-praktik kecurangan seperti adanya kasus korupsi maupun penyelewengan. Acaman ini berdampak pada komitmen auditor internal pemerintah terhadap kode etik dan standar audit khususnya pada pemeriksaan atas laporan keuangan agar kualitas audit dapat terjaga dan ditingkatkan. Kualitas audit ini penting karena kualitas audit yang bagus akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan.

Tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam menyusun kualitas audit dalam pelaporannya. Seorang auditor yang kompeten, baik dari segi pengetahuan dan pengalaman tentunya dapat melaksanakan proses audit. Menurut Surfeliya (2014) kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor sangatlah penting, untuk itu seorang auditor harus mempunyai keahlian dan kompetensi yang baik untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit sehingga bisa memberikan opini yang tepat. Sikap skeptisme profesional juga dapat mempengaruhi ketepatan auditor dalam memberikan opini.

Kompetensi saja belum cukup bagi seorang auditor internal pemerintah menjalankan dan melaksanakan tugasnya. Tidak mudah juga menjaga independensi dan profesionalisme auditor internal pemerintah. Berbagai fasilitas yang disediakan dalam masa pemeriksaan dapat mempengaruhi profesionalisme auditor, bukan tidak mungkin auditor tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan terpengaruhnya independensi auditor.

Konflik peran dan ketidakjelasan peran menjadi faktor yang penting dalam menghasilkan laporan auditor yang berkualitas. Konflik peran terjadi ketika seorang auditor mempunyai peran yang lebih dari satu dalam melaksanakan penugasan akan mempengaruhi kualitas audit yang tidak maksimal. Selain konflik peran, ketidakjelasan peran dalam penugasan untuk melakukan tugas audit sehingga auditor merasa bingung terhadap *jobdesk* masing-masing auditor. Jika ketidakjelasan peran tidak diatasi dengan baik maka akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan dalam laporan auditor.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dihadapi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh Independensi Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pengaruh Kompetensi Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta?
3. Bagaimanakah pengaruh Skeptisme Profesional Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta?
4. Bagaimanakah pengaruh Struktur Audit Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta?
5. Bagaimanakah pengaruh *Role Stress* Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Independensi Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta
2. Mengetahui pengaruh Kompetensi Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta
3. Mengetahui pengaruh Skeptisme Profesional Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.
4. Mengetahui pengaruh Struktur Audit Auditor Internal Pemerintah terhadap kualitas Audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.
5. Mengetahui pengaruh *Role Stress* Auditor Internal Pemerintah terhadap kualitas Audit di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta.

1. 4. Manfaat penelitian

Tujuan dari penelitian ini juga termasuk untuk memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan, termasuk dari pihak BPKP Perwakilan DIY dan publik sebagai pembacanya, adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada penelitian pada bidang audit guna meningkatkan kinerja dan kualitas hasil audit yang ada di BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan independensi, kompetensi, skeptisme profesional, *role stress*, dan kualitas hasil audit.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan ilmu akuntansi, khususnya audit pemerintahan dan dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh pada bangku kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yogyakarta.

b. Bagi BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam meningkatkan mutu kualitas hasil audit di BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bagi Auditor Internal di BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas hasil audit serta bisa memberikan motivasi bagi para auditor yang ada di BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta



1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi ini, pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang berupa penjabaran teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian lainnya. Terdapat hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran penelitian yang akan diteliti serta hipotesis yang timbul dari pemikiran tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini menguraikan mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan mengenai perhitungan dalam penelitian, meliputi hasil analisis data yang diperoleh dari sampel penelitian yang ada dan alat analisis yang diperlukan. Pada bab ini dijabarkan pula terkait dengan hasil dari penelitian untuk memastikan sesuai atau tidaknya dengan hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan tentang kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

